

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menindaklanjuti permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, bab ini secara khusus akan menyajikan dan menganalisis data empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis difokuskan untuk membedah bagaimana dinamika persepsi publik terbentuk di ruang digital, faktor-faktor apa yang memengaruhinya khususnya framing media serta bagaimana dampaknya terhadap legitimasi pemerintah. Pembahasan akan disajikan secara sistematis, dimulai dari deskripsi data, diikuti oleh analisis sentimen kuantitatif, analisis framing kualitatif, dan diakhiri dengan pembahasan tematik yang mengaitkan seluruh temuan.

3.1. Deskripsi Data Penelitian

3.1.1. Sumber dan Jenis Data

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari platform media digital YouTube. Karena Youtube merupakan salah satu ruang publik digital yang menampung persepsi masyarakat mengenai kebijakan pemerintah, termasuk isu *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg. Platform ini dipilih karena kemampuannya dalam memfasilitasi interaksi terbuka antara produsen konten dan warganet, sehingga membentuk ekosistem persepsi publik yang masif, dinamis, dan dapat diamati secara langsung.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas:

- Komentar publik: teks komentar pengguna YouTube yang merespons video terkait kebijakan LPG 3 kg, yang dianalisis secara kuantitatif melalui klasifikasi sentimen (positif, negatif, netral).
- Judul dan deskripsi video: untuk menangkap konteks narasi awal (framing) yang dibawa oleh kreator konten, baik dari kanal berita daring, individu, maupun kanal komunitas.
- Sumber kanal: identifikasi asal kanal (misalnya media nasional, kanal komunitas, influencer independen) sebagai informasi pendukung dalam mengidentifikasi orientasi narasi apakah bersifat elitis, populis, atau netral.

Periode pengambilan data dilakukan pada periode yang berdekatan dengan kebijakan distribusi subsidi LPG 3 kg. Total 4 video dari platform YouTube yang dianalisis, dengan pengambilan komentar dilakukan secara sistematis menggunakan metode *scraping data*.

Tabel 1 menyajikan daftar video YouTube yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Pemilihan video dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi konten terhadap topik kebijakan distribusi LPG 3 kg serta tingkat keterlibatan publik yang tercermin dari jumlah penayangan (*view count*) dan interaksi di kolom komentar.

Tabel 1 Daftar Video YouTube Sumber Data Penelitian

No	Thumbnail	Judul Video	Jumlah View
1		Putus Distribusi 'Gas Melon' di Pengecer, Adian: Jangan Kambing Hitamkan Warung #KONTROVERSI	1,1 jt
2		[FULL] Dialog - Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg	225 rb
3		[FULL] GARA - GARA GAS LEE KONTROVERSI	430 rb
4		Gas Elpiji 3 Kg Tidak Dijual Lagi di Pengecer, ke Mana Warga Bisa Membeli Gas ini?	175 rb

Video dalam tabel diunggah oleh kanal-kanal berita atau diskusi publik yang secara rutin membahas isu pemerintahan dan kebijakan publik. Judul-judul video secara eksplisit fokus pada perubahan distribusi LPG 3 kg, respons elit politik, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat kecil. Hal ini penting dalam konteks penelitian framing, karena video-video tersebut mengandung konstruksi narasi yang potensial mencerminkan posisi media dalam menyikapi kebijakan energi bersubsidi.

Selain itu, data komentar pada masing-masing video digunakan sebagai unit analisis utama dalam mengkaji sentimen publik. Dengan kata lain, video dalam tabel ini tidak hanya menjadi sumber informasi kebijakan, tetapi juga wadah interaksi yang memungkinkan publik mengekspresikan persepsi secara terbuka, sehingga relevan sebagai bahan analisis persepsi publik digital.

Pemilihan video dengan jumlah tayangan yang signifikan (ratusan ribu hingga jutaan penayangan) juga mencerminkan bahwa isu LPG 3 kg merupakan topik yang menimbulkan perhatian luas dari masyarakat. Oleh karena itu, konten-konten ini dapat dianggap sebagai *representatif wacana publik daring* dalam menilai respons dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi.

Perlu diakui bahwa salah satu karakteristik fundamental dari data yang dikumpulkan dari ruang publik digital seperti kolom komentar YouTube adalah anonimitas parsial dari para responden. Data yang diperoleh dalam bentuk komentar tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan klasifikasi demografis secara pasti terhadap setiap individu, termasuk membedakan secara tegas apakah seorang komentator merupakan pengguna langsung gas LPG 3 kg atau bukan.

Namun, batasan ini tidak mengurangi validitas temuan dalam konteks tujuan penelitian ini. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa fokus penelitian bukanlah pada perbandingan persepsi antar kelompok pengguna (*user groups*), melainkan pada analisis diskursus publik (*public discourse*) yang terbentuk secara kolektif. Persepsi publik yang memengaruhi legitimasi pemerintah tidak hanya datang dari mereka yang terdampak langsung, tetapi juga dari masyarakat luas yang merasa

sebuah kebijakan tidak adil, tidak empatik, atau tidak dikelola dengan baik. Sebuah komentar kritis dari seorang warga yang bukan pengguna LPG 3 kg, namun bersimpati pada kesulitan yang dialami orang lain, memiliki bobot yang sama pentingnya dalam membentuk sentimen kolektif dan tekanan politik.

3.1.2. Kriteria Pemilihan Data

Pemilihan data dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang mempertimbangkan relevansi konten, intensitas interaksi publik, serta potensi framing yang muncul dalam wacana digital. Video-video yang dijadikan sumber data, sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dipilih secara purposif (*purposive sampling*) dengan sejumlah kriteria sebagai berikut:

Tabel 2 Volume Komentar Publik Kebijakan LPG 3 Kg

No	Judul Video	Channel	Jumlah Komentar
1	Putus Distribusi 'Gas Melon' di Pengecer, Adian: Jangan Kambing Hitamkan Warung #KONTROVERSI	Metro TV	7.372
2	[FULL] Dialog - Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg	Metro TV	4.204
3	[FULL] GARA - GARA GAS LEE KONTROVERSI	Metro TV	2.442
4	Gas Elpiji 3 Kg Tidak Dijual Lagi di Pengecer, ke Mana Warga Bisa Membeli Gas ini?	Kompas	1.897

1. Keterkaitan Langsung dengan Isu Kebijakan Publik. Seluruh video secara eksplisit membahas topik distribusi dan subsidi LPG 3 kg, khususnya dalam konteks kebijakan baru pemerintah yang membatasi akses masyarakat terhadap gas subsidi tersebut. Hal ini penting karena memastikan bahwa persepsi yang dikaji benar-benar berkaitan dengan respons publik terhadap kebijakan yang sedang dikaji.
2. Sumber Video dari Kanal Media Arus Utama (*Mainstream*). Mayoritas video berasal dari kanal berita nasional seperti *Metro TV* dan *Kompas TV*, yang memiliki otoritas jurnalistik serta kapasitas pembentukan persepsi publik yang kuat. Media arus utama dipilih karena sering menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami arah kebijakan dan sikap elite pemerintahan.
3. Volume Interaksi dan Keterlibatan Publik yang Signifikan. Salah satu indikator penting dalam memilih data adalah banyaknya komentar publik yang muncul dalam video tersebut. Seperti ditunjukkan pada tabel, video pertama misalnya, menghasilkan lebih dari 7.000 komentar, yang menunjukkan tingginya intensitas reaksi publik. Data komentar inilah yang menjadi fokus utama dalam analisis sentimen pada penelitian ini.
4. Variasi Format dan Gaya Penyajian. Video mencakup format berita reportase, dialog interaktif, hingga tayangan kontroversial, yang memberikan spektrum narasi yang luas untuk dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Keragaman ini memperkaya kemungkinan penemuan pola framing dan reaksi publik yang beragam.

5. Kesesuaian Waktu Unggah dengan Momentum Kebijakan
Semua video yang dipilih diunggah dalam kurun waktu yang bersinggungan langsung dengan pengumuman dan pelaksanaan kebijakan baru LPG 3 kg pada tahun 2025. Hal ini penting untuk memastikan bahwa persepsi yang dianalisis benar-benar merefleksikan respons kontemporer terhadap kebijakan, bukan wacana yang telah kadaluarsa.

Dengan menerapkan kriteria tersebut, data yang diperoleh dipastikan memiliki kedalaman, relevansi, dan daya representasi yang kuat untuk dianalisis dalam konteks persepsi publik serta framing media terhadap kebijakan energi bersubsidi. Pemilihan ini juga mempertimbangkan potensi keterlibatan aktor politik, representasi suara masyarakat kecil, serta sejauh mana media berperan sebagai penyampai atau pembentuk persepsi dalam lanskap demokrasi digital.

3.2. Analisis Framing dan Sentimen Publik Lintas Video

3.2.1. Analisis Video 1

Video 1 memiliki judul “[FULL] Dialog - Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg”. Video ini dirilis oleh Metro TV pada 2 Februari 2025. Video ini berfungsi sebagai katalisator yang kuat bagi frustrasi publik. Ia tidak menciptakan kemarahan dari nol, melainkan memberikan validasi dan artikulasi bagi kecemasan yang sudah ada sebelumnya. Dengan menampilkan problematika ini di platform media nasional, individu-individu di dalam audiens merasa bahwa keluhan personal mereka adalah bagian dari masalah kolektif yang lebih besar, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam diskursus dengan meninggalkan komentar

negatif. Pada akhirnya, video berformat dialog ini, terlepas dari niat awalnya untuk berimbang, secara fungsional justru menjadi platform pertama bagi proses delegitimasi kebijakan karena ia secara telak memenangkan narasi humanistik di atas narasi teknokratis pemerintah.

a) Framing Video

Meskipun video ini disajikan dalam format "Dialog" yang secara teoretis seharusnya netral dan berimbang, framing yang terbangun secara implisit memiliki dua sisi yang saling bertentangan:

- Framing Pemerintah (*Problem-Solution*): Dari deskripsi "rencana untuk menata ulang distribusi... guna memastikan penyaluran tepat sasaran", pemerintah secara jelas membingkai kebijakan ini sebagai solusi rasional dan teknokratis untuk masalah yang ada (subsidi tidak tepat sasaran).
- Framing Dampak (*Conflict-Hardship*): Dengan mengangkat fakta bahwa "penjualan di tingkat pengecer, mulai dihentikan" dan ini berdampak pada "warung-warung kelontong", video ini secara inheren juga menyajikan bingkai konflik dan kesulitan. Ini adalah narasi tentang rakyat kecil yang terdampak oleh kebijakan dari atas.

Video yang dirilis oleh Metro TV pada 2 Februari 2025 ini, meskipun mengusung format "Dialog" yang mengesankan netralitas, pada praktiknya menjadi sebuah arena pertarungan antara dua kerangka narasi yang fundamentalnya berbeda. Di satu sisi, pemerintah mengusung framing teknokratis (*technocratic*

frame) yang berorientasi pada problem-solution. Melalui deskripsi resmi, kebijakan ini dibingkai sebagai sebuah langkah rasional dan terukur untuk menata ulang distribusi demi efisiensi dan ketepatan sasaran subsidi. Narasi ini berupaya membangun legitimasi melalui klaim kompetensi dan tata kelola yang baik.

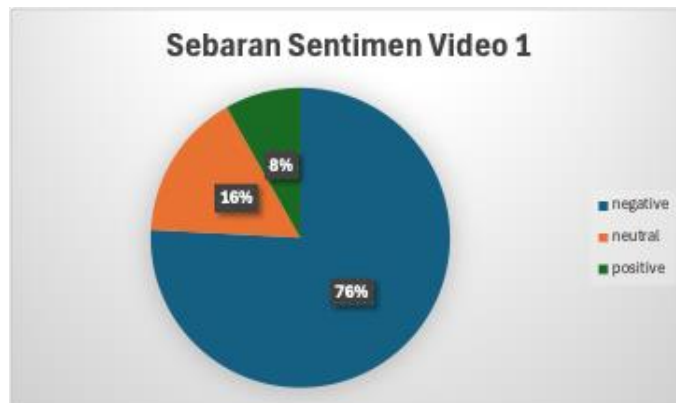
Namun, narasi teknokratis ini secara langsung dihadapkan pada framing humanistik-viktimisasi (*humanistic-victimization frame*). Dengan mengangkat fakta penghentian penjualan di tingkat pengecer dan dampaknya terhadap "warung-warung kelontong", video ini secara inheren menyajikan sebuah narasi konflik dan penderitaan. Di sini, fokus bergeser dari efisiensi sistem ke dampak nyata terhadap kehidupan rakyat kecil. Format dialog, alih-alih menetralkan kedua narasi, justru mempertajam kontras di antara keduanya, memaksa audiens untuk memilih antara logika sistemik pemerintah atau realitas kemanusiaan yang dihadapi warga.

b) Sentimen Publik

Pada video ini terdapat data sebagai berikut ini:

- Total Komentar: 4.204
- Sentimen Negatif: 3.188 komentar
- Sentimen Netral: 671 komentar
- Sentimen Positif: 344 komentar

Berdasarkan data tersebut tiga dari empat komentar bernada negatif. Gambar 19 bukan hanya menunjukkan penolakan, melainkan gelombang besar ketidakpuasan. Dukungan terhadap kebijakan ini (sentimen positif) hampir tidak signifikan, menunjukkan kegagalan total pemerintah dalam meyakinkan publik melalui narasi di video ini.



Gambar 19 Sebaran Sentimen Video 1

Pertarungan narasi yang terjadi dalam video tersebut menghasilkan respons publik yang terekam secara kuantitatif dalam data sentimen, dengan hasil yang sangat timpang. Dari total 4.204 entri komentar, mayoritas absolut sebesar 3.188 komentar (75,8%) bernada negatif. Sebaliknya, sentimen positif yang dapat diasosiasikan dengan penerimaan terhadap narasi pemerintah hanya berjumlah 344 komentar, atau sekitar 8,2% dari total diskursus.

Distribusi sentimen yang sangat asimetris ini merupakan bukti kuantitatif dari penolakan telak audiens terhadap framing teknokratis yang diusung pemerintah. Rendahnya angka sentimen positif menunjukkan bahwa narasi "solusi" dan "ketepatan sasaran" gagal beresonansi dan tidak mampu meyakinkan publik. Gelombang besar sentimen negatif ini menandakan bahwa audiens secara aktif menolak logika pemerintah dan lebih memilih untuk bersolidaritas dengan narasi tandingan yang berbasis pada kesulitan riil.

c) Interpretasi

Dalam isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, narasi konkret tentang penderitaan manusia akan selalu mengalahkan narasi abstrak tentang efisiensi birokrasi. Meskipun Metro TV menyajikan format dialog yang seimbang, audiens tidak merespons secara seimbang. Mereka secara selektif berempati pada framing "*Conflict-Hardship*".

- Kegagalan Framing Pemerintah: Narasi "tepat sasaran" dari pemerintah gagal diterima karena publik melihatnya sebagai jargon yang tidak menyentuh realitas kesulitan yang akan mereka hadapi (sulit mencari gas, warung kehilangan pendapatan).
- Kekuatan Empati: Publik jauh lebih mudah berempati dengan gambaran seorang pemilik warung kelontong yang terancam kehilangan bisnisnya daripada dengan tujuan pemerintah untuk menata data.
- Fungsi Video sebagai Katalisator: Video ini, meskipun formatnya dialog, berfungsi sebagai katalisator bagi frustrasi publik yang sudah ada sebelumnya. Ia memberikan platform bagi ribuan orang untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka, yang diperkuat oleh komentar-komentar negatif lainnya.

3.2.2. Analisis Video 2

Video 2 memiliki judul “[FULL] GARA - GARA GAS LEE | KONTROVERSI”. Video ini dirilis oleh Metro TV pada 4 bulan lalu.

a) Framing Video

Video ini menggunakan strategi framing yang jauh lebih agresif dan emosional dibandingkan video pertama:

- Framing Konflik Personal (David vs. Goliath): Ini adalah jantung dari video ini. Dengan mengundang secara khusus "seorang pria yang memarahi Bahlil secara langsung", Metro TV tidak lagi membingkai ini sebagai perdebatan kebijakan, melainkan konfrontasi personal antara "rakyat biasa" melawan "penguasa". Pria tersebut menjadi avatar atau perwujudan dari kemarahan kolektif publik.
- Framing Sensasionalisme: Judul "Gara-Gara Gas Lee" adalah bahasa gaul yang sangat merakyat dan langsung menunjuk pada "biang kerok" masalah. Penggunaan kata "KONTROVERSI" dalam judul juga secara sengaja mengarahkan audiens untuk mengharapkan drama dan pertarungan, bukan diskusi solutif.
- Framing Validasi Kemarahan Publik (Vox Populi): Talkshow ini tidak hanya melaporkan kemarahan publik; ia mengundang kemarahan itu ke atas panggung dan memberinya suara. Kehadiran narasumber dari pihak politisi (kemungkinan oposisi atau kritis) semakin memperkuat narasi bahwa pemerintah berada di pihak yang salah.

b) Sentimen Publik

Data komentar Anda sekali lagi menunjukkan hasil yang sangat jelas:

- Total Komentar: 2.442
- Sentimen Negatif: 1.835 komentar (~75,1%)
- Sentimen Netral: 300 komentar (~12,3%)
- Sentimen Positif: 307 komentar (~12,6%)

Gambar 20 menunjukkan Persentase sentimen negatifnya hampir identik dengan video pertama (~75%). Ini adalah temuan penting. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemarahan publik terhadap isu ini konsisten dan sangat tinggi, tidak peduli format videonya dialog atau talkshow konfrontatif. Yang berbeda adalah pemicu kemarahannya.



Gambar 20 Sebaran Sentimen Video 2

c) Interpretasi

Jika video pertama gagal membuat publik menerima narasi pemerintah, video kedua ini secara aktif menyerang legitimasi personal aktor pemerintah.

- Personifikasi Masalah: Dengan menghadirkan pria yang memarahi Menteri Bahliil, masalah "kebijakan LPG" berubah menjadi masalah

"Menteri Bahlil". Serangan menjadi jauh lebih personal dan emosional. Ini adalah langkah krusial dalam proses delegitimasi, karena lebih mudah bagi publik untuk membenci figur seseorang daripada membenci sebuah dokumen kebijakan yang abstrak.

- Talkshow sebagai Arena Gladiator: Program ini berfungsi seperti arena. Audiens tidak lagi hanya menonton berita; mereka menonton "jagoan" mereka (si pria) bertarung melawan "penguasa" (yang diwakili oleh politisi pro-pemerintah atau citra Bahlil). Kemenangan dalam pertarungan ini diukur dari seberapa banyak komentar negatif yang mendukung si "jagoan".
- Konsistensi Penolakan: Tingkat sentimen negatif yang stabil di angka ~75% di kedua video menunjukkan bahwa persepsi publik sudah mengkristal menjadi sebuah konsensus penolakan. Upaya apa pun dari pemerintah untuk membela diri di platform seperti ini hanya akan sia-sia dan justru menjadi bahan bakar baru bagi kemarahan publik.

3.2.3. Analisis Video 3

Video 3 memiliki judul "Gas Elpiji 3 Kg Tidak Dijual Lagi di Pengecer, ke Mana Warga Bisa Membeli Gas ini?". Video ini dirilis oleh Kompas TV pada 4 bulan lalu.

a) Framing Video

Video ini tidak menggunakan framing konfrontatif atau sensasional seperti dua video sebelumnya. Namun, dalam ilmu media, tidak ada berita yang 100%

bebas framing. Pilihan judul, sudut pandang, dan pertanyaan yang diajukan adalah bentuk framing itu sendiri:

- Judul sebagai Pemandu: Pertanyaan "ke Mana Warga Bisa Membeli Gas ini?" secara langsung memosisikan Kompas TV sebagai pemandu bagi publik yang bingung. Ia membingkai situasi ini bukan sebagai "konflik", melainkan sebagai "masalah informasi" yang perlu dipecahkan.
- Nada Objektif: Dengan menyajikan berita secara informatif, Kompas berusaha membangun citra sebagai sumber yang netral dan dapat dipercaya, yang hanya ingin membantu masyarakat memahami aturan baru.

Jika video pertama membuka ruang dialog, video kedua ini secara sengaja melakukan eskalasi naratif dengan mengubah perdebatan kebijakan menjadi sebuah drama konfrontasi. Strategi framing yang digunakan lebih agresif dan dirancang untuk memancing respons emosional yang kuat. Pertama, adalah framing konflik personal melalui dramaturgi politik "David vs. Goliath". Dengan secara khusus mengundang dan memberikan platform kepada seorang warga yang viral karena memarahi Menteri Bahlil, media tidak lagi memosisikannya sebagai narasumber, melainkan sebagai protagonis yang mewakili kemarahan kolektif. Menteri Bahlil, meskipun tidak hadir, menjadi antagonis simbolis. Ini mengubah isu dari "apa yang salah dengan kebijakan" menjadi "siapa yang harus disalahkan".

Kedua, framing ini diperkuat oleh sensasionalisme stilistik. Judul “Gara-Gara Gas Lee” adalah sebuah framing populis-kolokial yang meresonansi dengan bahasa non-elite dan secara langsung menunjuk "biang kerok" masalah. Penggunaan tagar “#KONTROVERSI” berfungsi sebagai meta-framing, yaitu sebuah instruksi dari media kepada audiens tentang bagaimana cara menginterpretasikan acara tersebut yakni sebagai sebuah pertarungan panas, bukan diskursus solutif.

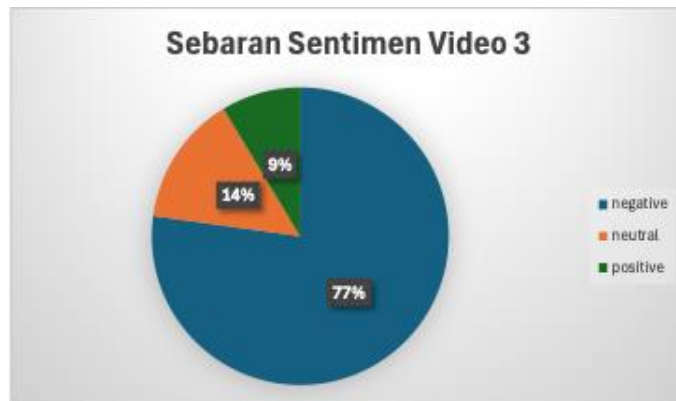
Ketiga, dengan menempatkan suara rakyat (melalui figur sang pria) sejajar dengan politisi di sebuah panggung talkshow, media melakukan validasi simbolis (*symbolic validation*). Keluhan personal diangkat statusnya menjadi sebuah pernyataan politik yang sah, yang secara efektif menguatkan narasi bahwa pemerintah berada di pihak yang berseberangan dengan rakyat.

b) Sentimen Publik

Data komentar Anda sekali lagi menunjukkan hasil yang sangat jelas:

- Total Komentar: 1.897
- Sentimen Negatif: 1.464 komentar (~77,2%)
- Sentimen Netral: 269 komentar (~14,2%)
- Sentimen Positif: 164 komentar (~8,6%)

Gambar 21 menunjukkan Persentase sentimen negatifnya hampir identik dengan video pertama dan kedua (~77%).



Gambar 21 Sebaran Sentimen Video 3

c) Interpretasi

Video ini membuktikan bahwa sumber kemarahan publik bukan semata-mata karena provokasi media, melainkan karena kebijakan itu sendiri yang secara fundamental ditolak.

- Kemarahan yang Meluap, Apa pun Wadahnya: Publik sudah terlanjur marah. Berita informatif dari Kompas TV ini ibaratnya hanya menyediakan "dinding kosong" baru bagi mereka untuk menuliskan grafiti kemarahan mereka. Mereka tidak peduli pada nada si penyampai pesan; mereka marah pada isi pesannya (kebijakan).
- Kegagalan Framing Netral: Ini adalah studi kasus sempurna yang menunjukkan bahwa framing netral atau layanan publik sekalipun tidak berdaya menghadapi isu yang begitu mengakar dan dianggap merugikan oleh masyarakat. Persepsi publik sudah terbentuk begitu kuat sehingga ia kebal terhadap upaya penenangan dari media.
- Memperkuat Argumen Delegitimasi: Temuan ini memperkuat argumen tentang delegitimasi. Penolakan publik tidak bergantung

pada apakah media menyajikannya secara dramatis atau tidak. Penolakan itu bersifat intrinsik dan absolut terhadap kebijakan pemerintah.

3.2.4. Analisis Video 4

Video 4 memiliki judul “Putus Distribusi 'Gas Melon' di Pengecer, Adian: Jangan Kambing Hitamkan Warung #KONTROVERSI”. Video ini dirilis oleh Metro TV pada 4 bulan lalu.

a) Framing Video

Video ini adalah sebuah mahakarya framing politik yang diciptakan oleh media. Metro TV secara sengaja mengisolasi argumen dari satu figure seorang politisi oposisi dan membingkainya sebagai suara perlawanan tunggal:

- Framing Manichean (Hitam vs. Putih): Dengan judul "Jangan Kambing Hitamkan Warung", video ini menciptakan narasi dualisme yang sangat sederhana dan kuat: di satu sisi ada "mereka" (pemerintah yang jahat dan menindas), dan di sisi lain ada "kita" (Adian dan rakyat kecil yang menjadi korban). Tidak ada ruang abu-abu.
- Framing Populis dan Personal: Adian diposisikan sebagai "Juru Bicara Rakyat". Setiap kalimatnya dirancang untuk menyuarakan apa yang ada di benak audiens. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini soal perjuangan dan pembelaan martabat.
- Clipping sebagai Senjata Politik: Mengambil bagian paling emosional dari sebuah talkshow panjang dan menyajikannya sebagai video

tersendiri adalah taktik untuk memaksimalkan dampak. Ini seperti mengisolasi racun paling mematikan untuk memastikan targetnya lumpuh.

b) Sentimen Publik

Data komentar Anda sekali lagi menunjukkan hasil yang sangat jelas:

- Total Komentar: 7.372 (terbanyak dari semua video)
- Sentimen Negatif: 4.330 komentar (~58,7%)
- Sentimen Netral: 958 komentar (~13,0%)
- Sentimen Positif: 2.084 komentar (~28,3%)

Gambar 24 menunjukkan penurunan sentimen negatif turun signifikan dari rata-rata ~76% di tiga video sebelumnya menjadi ~59%. Ledakan sentimen positif hampir tiga kali lipat, dari rata-rata ~10% menjadi 28,3%.



Gambar 22 Sebaran Sentimen Video 4

c) Interpretasi

Apa arti dari pergeseran dramatis ini? Ini adalah bukti dari sebuah proses politik yang lengkap.

- Fokus Bergeser dari "Mengeluh" menjadi "Memuji Sang Pahlawan": Penurunan sentimen negatif bukan berarti publik mulai suka dengan kebijakan pemerintah. Sama sekali tidak. Ini terjadi karena sebagian besar energi audiens tidak lagi hanya untuk mengutuk pemerintah, tetapi telah dialihkan untuk memuji sang pembela, yaitu Adian Napitupulu.
- Sentimen Positif Bukan untuk Pemerintah: 28,3% sentimen positif itu hampir pasti bukan untuk pemerintah atau kebijakannya. Itu adalah suara dukungan, pujian, dan harapan yang ditujukan kepada Adian. Komentar-komentar itu kemungkinan besar berbunyi seperti, "Mantap, Bung Adian!", "Ini baru wakil rakyat!", atau "Semoga bapak sehat selalu".
- Lonjakan sentimen positif sebesar 28,3% pada video ini merupakan sebuah anomali yang harus diinterpretasikan secara kritis. Berbeda dengan sentimen positif pada umumnya yang menunjukkan dukungan terhadap sebuah konsep atau kebijakan, sentimen positif di sini secara spesifik merupakan ekspresi dukungan dan persetujuan terhadap argumen oposisi yang disampaikan oleh Adian Napitupulu. Model analisis sentimen otomatis mengklasifikasikan frasa seperti 'Saya setuju dengan Bung Adian' atau 'Mantap, pembelaan untuk rakyat!'

sebagai 'positif'. Padahal, secara substansi, komentar-komentar ini justru memperkuat narasi anti-kebijakan pemerintah.

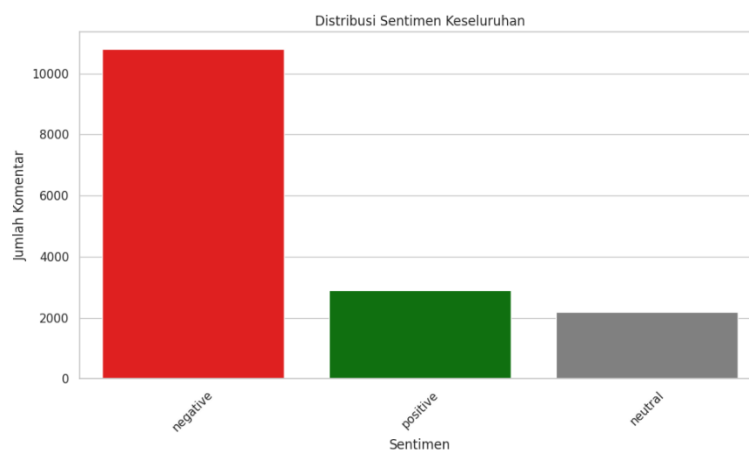
- Salah satu keterbatasan yang perlu diakui dari pendekatan analisis sentimen otomatis dalam konteks politik adalah ketidakmampuannya membedakan target dari sebuah sentimen. Seperti yang ditunjukkan pada analisis video keempat, sentimen 'positif' dapat berarti dukungan terhadap figur oposisi, yang secara esensial merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, interpretasi kualitatif menjadi krusial untuk memaknai data kuantitatif yang dihasilkan.
- Data anomali ini bukanlah noise atau data yang tidak berpengaruh, melainkan bukti kuantitatif paling kuat dari terjadinya proses transfer legitimasi. Ia secara empiris mengukur keberhasilan seorang aktor politik dalam 'memanen' ketidakpuasan publik dan mengonversinya menjadi modal dan reputasi politik personal. Jauh dari tidak signifikan, data ini justru mengungkapkan dampak paling canggih dari krisis persepsi publik ini: bagaimana kemarahan massa dapat menjadi sumber daya politik bagi pihak lain.

3.3. Hasil Analisis Sentimen Persepsi publik

3.3.1. Rekapitulasi Kategori Sentimen

Dari total 15.915 komentar yang berhasil dikumpulkan dari empat video YouTube pada Gambar 23 yang secara eksplisit membahas kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kg, dilakukan proses klasifikasi sentimen ke dalam tiga kategori

utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses klasifikasi ini dilakukan melalui pendekatan kombinatorik, yakni perpaduan antara analisis manual dan analisis semiotomatis berbasis leksikal, dengan mempertimbangkan kosakata bernuansa emosi, penggunaan kata kunci tertentu, serta struktur kalimat yang digunakan oleh warganet.



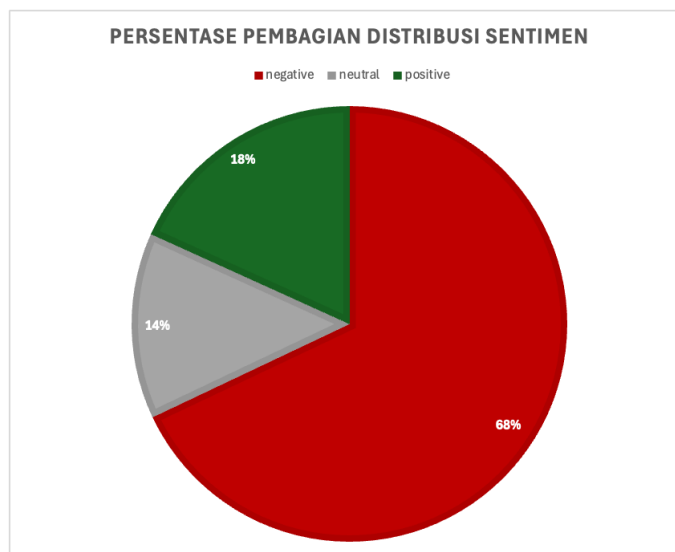
Gambar 23 Distribusi Kategori Sentimen

Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons publik dengan jumlah sebanyak 10.817 komentar atau sekitar 68,0% dari total komentar. Komentar-komentar dalam kategori ini umumnya mencerminkan kekecewaan, kemarahan, hingga kecemasan terhadap dampak kebijakan, khususnya terhadap kelompok masyarakat kecil dan pengecer tradisional. Sementara itu, sebanyak 2.198 komentar atau sekitar 13,8% dikategorikan sebagai netral, yang umumnya berupa pertanyaan klarifikasi, narasi pengalaman pribadi tanpa muatan nilai tertentu, atau pengulangan informasi dari isi video. Adapun komentar positif hanya berjumlah 2.900 komentar atau sekitar 18,2%, yang mengindikasikan adanya segmen publik yang mendukung atau menilai kebijakan tersebut sebagai langkah solutif, meskipun terbatas jumlahnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa wacana publik yang berkembang di media digital, khususnya YouTube, cenderung resistan dan kritis terhadap kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks studi ilmu pemerintahan, dominasi sentimen negatif dapat diinterpretasikan sebagai bentuk artikulasi ketidakpuasan publik terhadap proses formulasi maupun implementasi kebijakan publik, yang dinilai tidak inklusif atau tidak komunikatif. Dengan demikian, distribusi sentimen ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator reaksi emosional publik, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi politik warganet terhadap legitimasi dan keberterimaan sebuah kebijakan negara.

3.3.2. Representasi Visual Distribusi Sentimen

Sebagai pelengkap dari rekapitulasi numerik pada subbab sebelumnya, representasi visual dalam bentuk diagram lingkaran pada gambar 24 untuk mempermudah interpretasi atas distribusi sentimen publik terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg. Visualisasi ini menyajikan pembagian komentar publik ke dalam tiga kategori utama negatif, netral, dan positif berdasarkan total 15.915 komentar yang dianalisis.



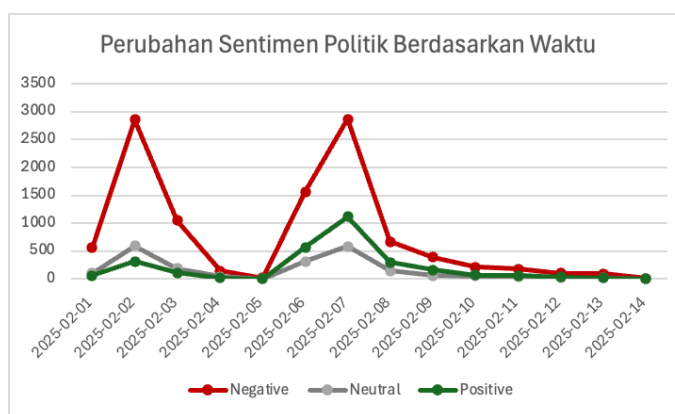
Gambar 24 Persentase Pembagian Distribusi Sentimen

Secara kasat mata, proporsi sentimen negatif tampak mendominasi grafik secara signifikan, menciptakan kontras visual yang kuat dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Dominasi ini menegaskan bahwa persepsi publik yang berkembang di media digital, khususnya di platform YouTube, lebih banyak mengandung ekspresi resistensi atau penolakan. Sementara itu, segmen positif dan netral terlihat lebih minor secara visual, menunjukkan ruang dukungan maupun ketidakpastian yang relatif kecil dalam persepsi publik terhadap kebijakan tersebut.

Visualisasi ini bukan sekadar menyajikan data secara grafis, tetapi juga menunjukkan asimetri persepsi publik terhadap kebijakan negara. Ketimpangan proporsi semacam ini dapat dibaca sebagai indikator kegagalan dalam proses komunikasi kebijakan, dan sekaligus memperlihatkan adanya *public trust gap* yang perlu ditangani secara strategis oleh aktor kebijakan.

3.3.3. Pola Serta Perubahan Sentimen Publik

Analisis temporal terhadap komentar publik di Gambar 25 menunjukkan bahwa pola distribusi sentimen tidak statis, melainkan mengalami fluktuasi intens pada minggu-minggu awal setelah unggahan video. Oleh karena itu, representasi visual dalam bagian ini difokuskan pada periode dua minggu pertama, yakni antara tanggal 1 hingga 14 Februari 2025, karena merupakan fase dengan intensitas reaksi tertinggi dan menunjukkan dinamika sentimen yang paling signifikan.



Gambar 25 Perubahan Sentimen Publik Berdasarkan Waktu

Puncak komentar negatif terjadi pada tanggal 2 Februari dan 7 Februari 2025, masing-masing dengan jumlah 2.855 dan 2.866 komentar bernuansa negatif. Lonjakan ini beriringan dengan viralnya pernyataan figur publik dalam salah satu video, serta mulai beredarnya potongan klip kontroversial yang memicu persepsi ketidakadilan terhadap masyarakat kecil. Pada periode yang sama, sentimen netral dan positif juga meningkat, namun dalam skala yang jauh lebih rendah.

Setelah tanggal 8 Februari, jumlah komentar harian menurun secara signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya fase *cooling down* dalam diskursus publik, yang mungkin disebabkan oleh meredanya pemberitaan atau tidak adanya

informasi baru yang memicu reaksi lanjutan. Pada fase ini, sentimen publik cenderung lebih tersebar secara acak dan tidak menunjukkan lonjakan emosional yang terstruktur.

Secara keseluruhan, pola perubahan sentimen publik ini menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap kebijakan cenderung bersifat spontan, masif, dan emosional pada fase awal, lalu berangsur menurun seiring berkurangnya eksposur dan munculnya kelelahan isu (*issue fatigue*). Dalam perspektif ilmu pemerintahan, fenomena ini dapat dimaknai sebagai bentuk respons adaptif masyarakat terhadap keputusan negara, yang seringkali tidak diiringi dengan strategi komunikasi publik yang memadai.

3.3.4. Ilustrasi Empiris melalui Sampel Ujaran Netizen

Untuk mendukung hasil kuantitatif dalam analisis sentimen, dilakukan analisis kualitatif pada Tabel 3 terhadap sejumlah komentar yang dianggap representatif dari masing-masing kategori sentimen: negatif, netral, dan positif. Cuplikan komentar ini bertujuan untuk memberikan gambaran empirik mengenai bagaimana persepsi publik terbentuk dan dikomunikasikan melalui platform digital, dalam hal ini YouTube.

Tabel 3 Contoh Komentar dari Video Youtube

Kategori	Contoh Sentimen
Negatif	- “Kasihani rakyat kecil bawa2 tabung jauh , sampai mati ibu2 antree gas 3kg kasihan lho” - “Gimana pak utk kami IRT yg tidak ada motor kalau jauh belinya bagaimana kami bisa masak anak kami kelaparan pak. Pernah rasain gas abis punya bayi ga ada motor hidup sendiri

Kategori	Contoh Sentimen
	paksu kerja gas diwarung habis. Anak bobo langsung lari jauh cari pengecer lah ini kalau dipangkalan ☹️” - “ini toh mntrinya yg mempersulit rakyat”
Netral	- “Intinya...gas 3kg warna pink... Edarkan....” - “Nanti setiap pangkalan menjual gas melon 3kg...biar terarah masarakat miskin melalui ktp.... Kk.” - “"Kalau Aman tolong disiapkan gas 3kg warna ping isupaya ada pilihan"”
Positif	- “solusi pemerintah tetap lebih baik dari adian karena semua permasalahan bisa diselesaikan oleh kebijakan pemerintah para pemain harga dan para pengoplos bisa hilang hanya saja yg perlu diperbaiki sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasaranya terlebih dahulu sehingga bisa berjalan lancar didaerah kami harga gas subsidi masih 30k” - “maksud pemerintah sebenarnya baik masalahnya sosialisasinya yang kurang. kritik bang adian juga sangat bagus dan konstruktif”

Komentar-komentar dengan sentimen negatif umumnya mengandung ekspresi emosional yang kuat, seperti kemarahan, kekecewaan, dan kepanikan, terutama yang berkaitan dengan kerentanan masyarakat kecil dalam mengakses energi domestik. Salah satu komentar menyatakan, *“Gimana pak utk kami IRT yg tidak ada motor kalau jauh belinya bagaimana kami bisa masak anak kami kelaparan pak...”* Ujaran ini menunjukkan dimensi spasial dan ekonomi dari kebijakan, yang dirasakan tidak berpihak pada kelompok rentan, serta menyingkap minimnya sensitivitas sosial dari implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menyalahkan langsung figur pejabat, seperti dalam komentar *“ini toh mntrinya yg mempersulit rakyat”*, yang memperlihatkan personifikasi keresahan publik terhadap otoritas negara.

Sementara itu, komentar netral bersifat informatif dan tidak menunjukkan afiliasi emosional yang kuat. Biasanya berupa pertanyaan, klarifikasi, atau usulan teknis yang bersifat normatif. Misalnya, komentar seperti *“Nanti setiap pangkalan menjual gas melon 3kg... biar terarah masyarakat miskin melalui KTP... KK”* memperlihatkan upaya warganet dalam memahami serta mengusulkan format distribusi yang dianggap lebih tertib dan akuntabel.

Di sisi lain, meskipun lebih sedikit, komentar positif mengindikasikan adanya segmen masyarakat yang menyambut baik kebijakan atau mendukung pihak tertentu. Komentar seperti *“Kali ini saya setuju dengan Pak Adian...”* memperlihatkan adanya pembelaan terhadap narasumber yang dianggap mendukung rakyat, sementara komentar lain seperti *“Alhamdulillah di rmpt sy udah ada PGN jd ga sibuk cari gas 3kg...”* menunjukkan bahwa tidak semua wilayah mengalami dampak negatif, atau bahwa ada keberhasilan lokal dalam implementasi kebijakan distribusi energi.

3.4. Analisis Framing dalam Narasi Media Digital

Dalam konteks distribusi LPG 3 kg, narasi yang dibangun oleh kanal-kanal berita seperti *Metro TV* dan *Kompas* menunjukkan kecenderungan framing tertentu yang patut dianalisis secara mendalam untuk memahami posisi ideologis media dan dampaknya terhadap legitimasi kebijakan.

3.4.1. Analisis Orientasi Framing

Dalam video berjudul *“Putus Distribusi 'Gas Melon' di Pengecer, Adian: Jangan Kambing Hitamkan Warung”*, orientasi framing yang disampaikan oleh

Adian Napitupulu sangat jelas dan konsisten: berpihak kepada rakyat kecil dan sektor informal, bukan kepada elite institusional atau teknokratik negara. Narasi yang dibangun secara sistematis membongkar bahwa kebijakan distribusi LPG 3 kg yang menyudutkan pengecer dan warung kecil bukan hanya tidak adil, tetapi juga keliru secara logika dan moral.

“Kenapa warung yang jadi kambing hitam, padahal negara yang gagal memberantas pengoplos?”

Pernyataan ini menjadi simpul utama dari strategi framing *blame reversal* sebuah teknik yang digunakan untuk membalikkan arah tuduhan. Dalam konteks ini, Adian dengan sengaja menysar kegagalan struktural negara, bukan sekadar melihat persoalan dari sisi permukaan (yakni praktik pengecer yang dianggap tidak sah). Ia membongkar bahwa inti masalah bukan di warung, tapi pada lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengoplosan gas yang menyebabkan kebocoran hingga 30% dari 7,2 juta metrik ton LPG subsidi.

“Kebocoran gas LPG subsidi kita kenapa warungnya yang jadi kambing hitam? Enggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambinghitamkan warung!”

Framing ini memperlihatkan dua hal penting:

1. **Negara gagal menjalankan fungsi kontrol dan penegakan hukum,** padahal pengoplosan adalah tindakan kriminal yang dilakukan dalam skala besar.

2. **Pengecer informal (warung)** hanyalah *produk dari kegagalan sistemik negara* dalam menyediakan lapangan kerja dan akses distribusi energi yang merata.

Adian bahkan mengangkat fakta bahwa rakyat sendiri tidak menuntut negara secara berlebihan mereka hanya bertahan hidup, berdagang kecil-kecilan, dan tetap melayani warga lain:

“Kenapa dia jualan, jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan. Rakyat bikin warung. Oke. Rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara.”

Dengan ini, posisi rakyat kecil bukan hanya dipertahankan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor yang solutif. Mereka justru mengisi kekosongan sistem. Ini menjadikan framing-nya bukan hanya pro-rakyat, tapi juga anti-stigma terhadap sektor informal. Ia tidak hanya menyalahkan negara secara abstrak, tetapi secara konkret menunjukkan kegagalan regulasi LPG yang membolehkan pengecer menjual 10% dari kuota:

“Mereka belanja. Nah, justru itu, pengawasan negara hadir untuk mengontrol itu agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek itu pengoplosnya.”

Adian juga menggugat narasi elitis tentang *penertiban warung* menjadi *sub pangkalan*, yang justru membebani pelaku kecil secara modal:

“Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung... mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20? 25? Mungkin 30? Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini?”

Pernyataan ini menyerang logika teknokratis yang tidak memahami kapasitas ekonomi rakyat. Ia menyoroti bahwa perubahan skema distribusi LPG bukan hanya soal sistem, tapi menyangkut ketimpangan akses terhadap sumber daya, modal, dan keadilan distribusi.

Terakhir, Adian menutup dengan kritik keras terhadap negara sebagai entitas yang tidak hanya lalai, tetapi juga melarikan diri dari tanggung jawab konstitusional:

“Yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional... ditimpakan ke rakyat!”

Secara keseluruhan, framing yang dibangun dalam video ini bukan semata-mata “pro-rakyat”, tetapi sebuah bentuk pembelaan ideologis terhadap hak-hak ekonomi warga kecil dalam sistem distribusi energi nasional. Ini adalah narasi tandingan terhadap struktur dominan, dan sekaligus seruan untuk *redistribusi tanggung jawab* dari rakyat ke negara.

3.4.2. Fokus Narasi: Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Kelompok Rentan

Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg oleh Kementerian ESDM mulai 1 Februari 2025 seolah hadir dengan maksud baik: mencatat distribusi, memastikan subsidi tepat sasaran, dan menghilangkan “over-supply” yang rawan penyimpangan. Tetapi seperti banyak kebijakan teknokratis, yang terlihat rapi

dalam spreadsheet justru bisa menjelma mimpi buruk di lapangan khususnya bagi rakyat kecil yang tak punya privilese mobilitas, uang tunai, atau bahkan akses digital.

“Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah enggak ada lagi... kita catatkan distribusi secara keseluruhan...”

Ucapan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mencerminkan optimisme sistemik. Tapi di balik kalimatnya, muncul pertanyaan krusial: bagaimana rakyat kecil terutama ibu rumah tangga, buruh harian, warga desa terpencil, hingga penghuni gang sempit di kota besar mengakses tabung gas jika pengecer lokal ditiadakan?

a) Narasi dari Atas dan Bawah: Ketika Prosedur Bertabrakan dengan Realita

Video dari Kementerian ESDM menggambarkan LPG 3 kg secara steril: angka-angka distribusi, jumlah pangkalan resmi (259.226 titik), papan informasi lengkap, dan harga eceran tertinggi yang dijamin pemerintah. Di ruang rapat dan layar presentasi, ini tampak seperti sistem logistik yang rapi, terukur, dan efisien.

Tapi realitas di lapangan? Jauh dari rapih dan ideal. Adian Napitupulu memotret sisi lain cerita yang kerap terabaikan: kisah nyata rakyat kecil yang bergulat dengan kebijakan yang, walau dibuat “demi kebaikan bersama,” justru menciptakan beban baru bagi mereka yang sudah dalam kondisi sulit.

- Ibu-ibu harus menenteng tabung gas seberat 3 kg hingga 4 kilometer. Ini bukan cerita dramatisasi, tapi fakta pahit yang dialami sehari-hari oleh mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.
- Warga miskin yang tak punya kendaraan atau ongkos lebih, terpaksa berjalan jauh atau menanggung risiko tidak mendapatkan gas. Mereka tidak punya akses mudah ke pangkalan karena keterbatasan fisik dan ekonomi.
- Ketika membeli gas di pangkalan, mereka tidak bisa berutang sistemnya ketat dan kaku. Sementara di warung tetangga, warga bisa menunda bayar, meminjam satu tabung gas, bahkan mengandalkan kebaikan sosial dan saling percaya. Warung bukan sekadar toko, tapi “bank sosial” bagi mereka yang hidup dari hari ke hari.

Di sinilah letak paradoks kebijakan yang tampak sistematis: efisiensi administratif menyingkirkan fleksibilitas sosial yang sebenarnya vital untuk bertahan hidup di masyarakat miskin. Pengecer lokal bukan sekadar penjual barang, tapi penyelamat kecil yang mengisi kekosongan peran negara mereka menyediakan kemudahan, kepercayaan, dan layanan ekstra seperti antar tabung ke rumah, bahkan membantu pasang tabung gas di kompor.

Kebijakan yang ideal di atas kertas justru mengabaikan realitas sosial, menjadikan pengecer sebagai kambing hitam atas masalah yang lebih besar dan kompleks seperti pengoplosan dan kebocoran LPG subsidi. Padahal, warung kecil hanya mendapatkan margin keuntungan sekitar Rp1.000–Rp2.000 per tabung bukan sumber keuntungan besar, melainkan sekadar penghidupan sehari-hari.

Ironisnya, dalam upaya membereskan sistem distribusi agar “lebih terkontrol,” negara malah mengabaikan fungsi sosial dan ekonomi warung sebagai bagian dari jaringan kehidupan masyarakat miskin. Mereka yang sebenarnya paling rentan justru harus menanggung beban tambahan: akses yang makin sulit, kehilangan tempat berutang, dan risiko kekurangan energi rumah tangga.

Ini bukan sekadar masalah gas subsidi ini soal ketidaksiapan kebijakan formal menghadapi dinamika sosial di akar rumput. Negara memang perlu menata distribusi, tapi bukan dengan cara menghilangkan ruang gerak sosial yang selama ini menopang rakyat kecil. Jika tidak, kebijakan itu bukan solusi, melainkan pembebanan struktural baru bagi kelompok rentan.

b) Kemiskinan yang Tidak Terdata: Warga Tak Terlihat dalam Sistem Online

Kementerian ESDM optimis menyebut bahwa pendaftaran pangkalan dan pencatatan nomor induk kependudukan (NIK) dapat dilakukan secara online, dengan anggapan “tidak ada kendala.” Tapi kenyataannya? Ini lebih mirip mimpi di siang bolong yang jauh dari realita rakyat kecil.

Siapa yang benar-benar mengakses dan memahami sistem online ini? Apakah semua warga desa atau perkampungan kumuh punya smartphone? Apakah mereka paham dengan proses pendaftaran digital yang rumit dan penuh jargon birokrasi?

Jangan lupa, kita bicara tentang kelompok rentan yang selama ini sudah berjuang dengan minimnya akses teknologi, kurangnya pendidikan digital, bahkan keterbatasan sinyal internet di daerah-daerah terpencil. Mereka yang tidak punya

ponsel pintar atau sekadar pulsa internet jelas menjadi “buta teknologi” dalam hitungan detik.

Lebih parah lagi, bagaimana dengan mereka yang rumahnya jauh dari pangkalan resmi, bahkan tidak masuk dalam daftar formal pemerintah? Mereka bukan hanya kesulitan membeli LPG, tapi juga tak tercatat dalam sistem distribusi resmi yang kini kian mengandalkan teknologi digital.

Kebijakan digital tanpa digital literacy sejatinya adalah eksklusi terselubung. Ini bukan hanya soal gap teknologi, tapi soal penyingkiran sosial yang halus warga miskin yang tak punya akses, tak paham sistem, tak terdata, otomatis tersisih dan dihapuskan dari radar distribusi LPG.

Ini bukan hanya kegagalan teknis, tapi kegagalan kebijakan yang menambah daftar panjang kemiskinan tak terlihat mereka yang ada, namun tidak pernah diakui, dibiarkan menghilang di balik layar sistem digital yang “ideal” tapi tak berkehidupan nyata.

Singkatnya, digitalisasi yang seharusnya menjadi solusi malah jadi alat peminggiran baru yang memperparah ketidakadilan sosial. Rakyat kecil, yang sudah bertarung keras dengan kesulitan hidup, kini harus menghadapi dilema tambahan: terjebak dalam sistem yang tidak mengenal mereka.

c) Narasi Empatik vs Narasi Administratif

Dalam video dan pernyataannya, Adian Napitupulu menyuarakan suara rakyat kecil yang sering luput dari perhatian kebijakan resmi. Ia menggambarkan betapa beratnya beban warung-warung kecil yang hanya mengambil keuntungan

seadanya, Rp1.000 hingga Rp2.000 per tabung, namun kini dipaksa membeli tabung sendiri dalam jumlah besar 50 sampai 100 tabung.

Adian mempertanyakan dengan gamblang, apakah ini sudah jadi bisnis tabung atau distribusi negara?

“Ini bukan sekadar jualan, tapi soal keberlangsungan hidup rakyat kecil yang menggantungkan penghasilan hariannya pada warung-warung tersebut. Kalau beban ini terus ditambah, siapa yang akan menanggung beban sosialnya?”

Di sisi lain, narasi resmi dari Wakil Menteri ESDM melukiskan gambaran yang jauh berbeda: pangkalan resmi beroperasi dengan papan informasi yang lengkap, harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan masyarakat bisa langsung menimbang isi tabung untuk memastikan kualitasnya. Semua tampak rapi dan sistematis di atas kertas.

Namun, narasi ini bicara soal sistem, formalisme, dan kontrol administratif, tanpa menyentuh kondisi lapangan yang penuh ketidakpastian dan perjuangan.

Inilah benturan dua paradigma mendasar:

- Negara sebagai regulator yang mengutamakan keteraturan, pencatatan, dan mekanisme administratif yang ideal.
- Negara sebagai pelayan masyarakat, yang harus memahami kompleksitas sosial-ekonomi dan memberikan ruang bagi fleksibilitas serta empati dalam implementasi kebijakan.

Narasi Adian merefleksikan realitas pahit yang dihadapi rakyat kecil sehari-hari, tentang bagaimana kebijakan yang kaku dan terpusat malah menambah beban mereka. Sementara narasi pemerintah cenderung memaksakan idealisme birokrasi, mengabaikan dinamika sosial dan kebutuhan adaptasi di lapangan.

Jika kebijakan hanya diukur dari kepatuhan administratif dan tidak mempertimbangkan dampak sosialnya, maka jangan heran jika rakyat kecil merasa terpinggirkan dan kebijakan dianggap jauh dari kenyataan.

Kebijakan yang berhasil haruslah yang mampu menjembatani dua dunia ini menggabungkan kejelasan aturan dengan kepekaan sosial, bukan malah menimbulkan jarak dan ketidakadilan baru.

d) Yang Rentan Menjadi Korban Bisu

Narasi ini bukan hanya soal tabung gas 3 kg. Ini tentang bagaimana negara dalam semangat merapikan sistem justru menciptakan kekacauan bagi mereka yang paling tidak bersuara. Ketika kebijakan hanya disusun dari atas ke bawah, maka yang paling dulu terinjak adalah mereka yang berada paling bawah. Yang tidak punya waktu, tenaga, apalagi akses untuk ikut bicara.

Ibu rumah tangga yang menenteng tabung gas sejauh 4 kilometer bukan hanya potret ketahanan, tapi juga bukti bisunya sistem bahwa tidak ada ruang untuk kelelahan dan kerepotan dalam logika digitalisasi dan efisiensi distribusi.

Pekerja harian yang tak punya cukup uang tunai di awal minggu dan harus utang gas dari warung sebelahnya, tidak masuk dalam radar sistem karena negara hanya mengenali transaksi yang terekam bukan solidaritas antar warga.

Warung kecil, yang selama ini menjadi pengganti negara dalam menyediakan akses cepat, fleksibel, dan manusiawi justru disingkirkan. Mereka bukan hanya dicoret dari jalur distribusi, tapi juga dari definisi "resmi" tentang siapa yang boleh menyalurkan bantuan negara. Padahal merekalah yang selama ini menjadi jaring pengaman informal, menopang ekosistem kebutuhan dasar warga kecil.

Kalimat sederhana ini mengungkap kompleksitas besar: kebijakan negara membunuh rasa tolong-menolong yang justru jadi satu-satunya "bank sosial" bagi masyarakat miskin. Negara mengagungkan sistem digital dan prosedur, namun lupa bahwa masyarakat kecil tak hidup dalam spreadsheet mereka hidup dalam relasi sosial.

Adian Napitupulu dalam hal ini bukan sekadar membela pengecer gas. Ia menempatkan dirinya sebagai juru bicara bagi mereka yang tak sempat protes, tak tahu cara mengeluh, dan tak tahu kepada siapa harus bersuara. Ia memaksa negara untuk melihat bahwa rakyat kecil bukan hambatan sistem, mereka adalah tujuan sistem itu sendiri.

3.4.3. Posisi Aktor dalam Kebijakan

a) Korban: Rakyat Kecil yang Tak Tercatat dalam Sistem

Adian Napitupulu membingkai warung kecil, ibu rumah tangga miskin, dan pengecer informal sebagai korban dari kebijakan yang gagal membaca realitas lapangan. Korban dalam narasi ini bukan hanya mereka yang terkena dampak ekonomi, tapi juga yang terhapus dari sistem formal karena tidak memiliki kendaraan, akses digital, ataupun daya tawar. Dalam narasi ini, korban bukan pasif.

Mereka adalah agen sosial yang selama ini mengisi kekosongan fungsi negara, namun justru ditekan ketika negara memutuskan 'menata ulang' sistem.

b) Pelaku: Negara yang Abai

Kebocoran subsidi gas sebesar $\pm 30\%$ bukan disebabkan oleh pengecer kecil, melainkan oleh praktik pengoplosan yang berlangsung sistematis dan terorganisir. Namun alih-alih membongkar akar struktural masalah tersebut, negara justru memilih "jalan pintas" dengan memotong mata rantai distribusi informal. Ironi besar di sini adalah: negara memosisikan rakyat kecil sebagai 'pengganggu' sistem, padahal justru aktor besar dan ilegal yang luput dari pengawasan.

c) Dua Logika Justifikasi yang Bertentangan

Pada puncaknya, pertarungan narasi dalam isu kebijakan LPG ini dapat dipahami sebagai benturan antara dua logika justifikasi yang fundamentalnya berbeda: logika tata kelola pemerintah versus logika keadilan sosial publik. Dari perspektif pemerintah, kebijakan distribusi ini dibenarkan melalui kacamata efisiensi sistemik dan tanggung jawab fiskal. Fokus utama mereka adalah memperbaiki sistem distribusi yang dianggap "bocor" dan tidak adil, sehingga solusi yang ditawarkan pun bersifat teknokratis, yaitu perbaikan sistem melalui digitalisasi yang ketat untuk menyelamatkan APBN dan menjamin "keadilan" jangka panjang bagi penerima subsidi yang sah. Dalam bingkai ini, musuh utamanya adalah inefisiensi dan pemborosan.

Namun, logika yang rasional dan berorientasi pada sistem ini berhadapan langsung dengan justifikasi tandingan yang diusung oleh para kritikus dan diamini

oleh publik. Logika tandingan ini beroperasi pada level kemanusiaan dan dampak langsung. Dari perspektif ini, sebuah kebijakan dianggap gagal bukan karena sistemnya tidak efisien, melainkan karena ia menyulitkan dan mengancam kesejahteraan warga paling rentan saat ini juga. Prioritas mereka bukanlah ketertiban sistem di masa depan, melainkan kemudahan akses dan perlindungan terhadap "orang kecil" dari dampak aturan yang dianggap tidak empatik. Oleh karena itu, konflik ini dapat disimpulkan sebagai benturan ideologis antara logika efisiensi sistem yang berorientasi makro dengan logika keadilan akses yang berorientasi mikro. Dalam arena persepsi publik yang sangat sensitif terhadap isu kebutuhan pokok, narasi yang kedua, yang berpusat pada manusia, terbukti memiliki daya tarik emosional dan moral yang jauh lebih superior.

3.5. Dinamika Persepsi publik: Temuan Utama

Bagian ini merangkum pola, aktor, dan dinamika persepsi publik yang berkembang di media digital dan pemberitaan nasional terkait kebijakan LPG subsidi tahun 2025. Secara keseluruhan, persepsi publik tidak hanya menunjukkan resistensi terhadap kebijakan, tetapi juga memperlihatkan pertarungan naratif antara realitas masyarakat kecil dan logika administratif negara. Tiga hal utama yang menjadi benang merah dalam dinamika ini adalah: ketimpangan akses, ketidakadilan struktural, dan disonansi kebijakan.

3.5.1. Isu Sentral dan Topik Dominan

Isu sentral dalam dinamika persepsi publik tahun 2025 adalah pencabutan jalur distribusi melalui pengecer informal, yang secara langsung memengaruhi

akses masyarakat kecil terhadap LPG bersubsidi. Topik-topik dominan yang terus berulang di media digital maupun media pemberitaan meliputi:

- Kesulitan masyarakat miskin mendapatkan LPG 3 kg karena jauhnya jarak ke pangkalan resmi.
- Larangan menjual di warung yang dianggap memutus jaringan distribusi sosial yang selama ini hidup dan berfungsi.
- Kebijakan digitalisasi sistem (pendataan NIK dan transaksi online) yang dianggap tidak inklusif terhadap masyarakat tanpa akses teknologi.
- Pernyataan kontroversial pejabat, yang memperkeruh persepsi publik, seperti mengklaim distribusi akan “lebih tertib” tanpa memahami realitas di lapangan.
- Viralnya testimoni warga kecil: ibu-ibu yang harus jalan 4 km membawa gas, atau masyarakat yang hanya bisa beli karena bisa ngutang di warung.

Isu ini membesar bukan hanya karena kelangkaan, tapi karena terasa tidak adil dan tidak manusiawi. Banyak netizen mengangkat narasi bahwa "kebijakan ini mungkin baik di atas kertas, tapi tidak punya empati di lapangan."

3.5.2. Aktor Penggerak Persepsi

Ada beberapa kategori aktor yang mendorong dinamika persepsi publik:

a) Aktor Politik Kritis

Seperti Adian Napitupulu, yang membingkai isu ini sebagai kegagalan struktural negara dalam melindungi rakyat kecil. Ia tidak hanya menyuarakan resistensi, tapi juga menyusun ulang posisi korban dan pelaku dalam narasi publik

mendesak negara untuk berhenti menyalahkan warung dan mulai mengakui perannya.

b) Jurnalisme Independen & Kanal YouTube Alternatif

Kanal seperti RaymondChin, Ferry Irwando, atau video persepsi warga di YouTube yang sering menjadi pemantik perdebatan. Mereka menyajikan data, wawancara warga, dan visual yang memperlihatkan kontras tajam antara realitas lapangan dan narasi resmi pemerintah.

c) Warganet *Grassroot*

Komentar-komentar warganet di media digital khususnya YouTube memperkuat resonansi kritik. Foto tabung kosong, antrean panjang, testimoni kesulitan membeli gas, semua menjadi bagian dari narasi bersama yang memperkuat sentimen kolektif.

3.5.3. Pola Viralitas dan Efek Resonansi terhadap Media

Persepsi publik terhadap isu ini memiliki ciri khas viralitas yang berbasis empati dan keterhubungan sosial. Konten yang paling cepat menyebar umumnya adalah:

- Video testimoni ibu rumah tangga atau pemilik warung.
- Cuplikan pernyataan pejabat yang kontras dengan realitas (misalnya, “tidak ada kendala dalam pendaftaran online”).
- Grafik atau meme yang membandingkan harga, jarak, dan kesulitan distribusi.

Efek resonansi dari viralitas ini meluas hingga ke media arus utama yang kemudian mulai mengangkat aspek-aspek yang sebelumnya tidak disorot dalam narasi resmi, seperti beban distribusi di warung kecil atau eksklusi warga dari sistem digital.

Selain itu, fenomena cross-platform menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap isu ini memiliki daya replikasi tinggi, terutama karena setiap orang bisa mengalami atau melihat langsung dampaknya. Isu ini tidak abstrak.

3.5.4. Keselarasan dan Disonansi antara Narasi Media dan Respons

Warganet

Pada awalnya, media arus utama mengikuti narasi resmi pemerintah menekankan “penataan distribusi”, “ketepatan sasaran”, dan “transparansi sistem”. Namun, seiring naiknya kritik dari bawah dan viralnya narasi warga kecil, terjadi disonansi yang kian terbuka:

- Media mulai mengutip pernyataan warga yang tak terjangkau pangkalan.
- Narasi pemberitaan mulai menggeser fokus dari efisiensi sistem ke dampak sosial yang nyata kelangkaan, antrean panjang, beban warga miskin.
- Beberapa media menyandingkan data Kementerian dengan kondisi lapangan menciptakan ruang diskusi baru yang lebih kritis.

Namun, reaksi warganet jauh lebih cepat dan emosional. Banyak warganet tidak menunggu klarifikasi pemerintah atau media, mereka langsung membentuk

narasi sendiri melalui foto, video yang membangun “versi rakyat” atas realitas kebijakan.

3.6. Dampak terhadap Legitimasi Kebijakan dan Aktor Pemerintah

3.6.1. Erosi Kepercayaan Fondasi Delegitimasi

Proses delegitimasi sebuah kebijakan secara fundamental berakar pada disintegrasi kepercayaan (*trust*) publik terhadap otoritas yang merumuskannya. Dalam kasus kebijakan distribusi LPG bersubsidi, indikator empiris primer dari erosi kepercayaan ini terekam secara kuantitatif dalam ruang publik digital. Analisis sentimen menunjukkan bahwa 68,0% dari total diskursus publik bernada negatif. Angka ini bahkan lebih mengkhawatirkan ketika dibedah pada level video individual, di mana tingkat penolakan secara konsisten mencapai skala mayoritas absolut, berkisar antara 75,1% hingga 77,2% pada video-video berita utama. Angka-angka ini bukan sekadar statistik ketidaksukaan; ia berfungsi sebagai representasi kuantitatif dari sebuah mosi tidak percaya massal, yang menandakan kegagalan negara dalam meraih persetujuan publik untuk kebijakannya.

Namun, data kuantitatif hanya mampu mengukur skala dan intensitas dari erosi kepercayaan, tetapi tidak dapat mengungkap tekstur dan substansi dari penderitaan yang melandasinya. Untuk memahami dimensi kemanusiaan di balik angka-angka tersebut, analisis harus bergerak ke tingkat kualitatif. Di sinilah narasi-narasi individual memberikan validitas dan kedalaman pada temuan statistik. Salah satu komentar yang menjadi mikrokosmos dari kecemasan kolektif datang dari seorang ibu rumah tangga yang menulis:

“Gimana pak utk kami IRT yg tidak ada motor kalau jauh belinya bagaimana kami bisa masak anak kami kelaparan pak...”

Ujaran ini secara gamblang mengartikulasikan persepsi bahwa kebijakan tersebut dirancang dalam ruang hampa, terdiskoneksi dari realitas sosio-ekonomi masyarakat rentan. Narasi seperti ini memberikan resonansi emosional dan logis yang menjelaskan mengapa angka penolakan bisa begitu tinggi; ketidakpercayaan itu lahir dari rasa takut dan perasaan ditinggalkan oleh negara.

Eskalasi dari erosi kepercayaan ini mencapai kulminasinya ketika disonansi yang terakumulasi di ranah digital meluap menjadi manifestasi fisik di dunia nyata. Momen krusial ini adalah peristiwa konfrontasi langsung antara seorang warga dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah tindakan penuntutan akuntabilitas yang spontan, warga tersebut berseru,

“Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini... jangan rakyat yang dikorbankan”

Peristiwa ini secara definitif menegaskan bahwa krisis kepercayaan telah bertransformasi dari sekadar sentimen virtual menjadi sebuah aksi politik yang nyata dan konfrontatif. Ini adalah bukti akhir bahwa fondasi legitimasi kebijakan tersebut telah retak secara fundamental, tidak hanya di kolom komentar, tetapi juga di hadapan pembuat kebijakan itu sendiri.

3.6.2. Framing Media sebagai Mesin Delegitimasi

Temuan kuantitatif sebelumnya yang menunjukkan dominasi absolut sentimen negatif pada dasarnya adalah potret dari ‘apa’ yang dirasakan publik:

sebuah gelombang penolakan dan ketidakpuasan. Namun, data tersebut belum menjawab pertanyaan fundamental ‘bagaimana’ sentimen ini dibentuk, disalurkan, dan diperkuat hingga menjadi sebuah gerakan delegitimasi yang koheren. Untuk menjawabnya, analisis harus beralih dari kuantifikasi sentimen ke dekonstruksi kualitatif terhadap narasi. Di sinilah analisis framing menjadi krusial, untuk membongkar bagaimana media tidak hanya berfungsi sebagai cermin pasif dari realitas, melainkan sebagai ‘mesin’ atau arsitek narasi yang secara aktif menyediakan skema kognitif bagi publik untuk menginterpretasikan krisis dan menyalurkan kemarahan mereka.

Mekanisme utama dari ‘mesin’ delegitimasi ini adalah penyederhanaan isu kebijakan yang kompleks menjadi sebuah drama moral yang biner. Alih-alih menyajikan perdebatan teknis tentang efisiensi distribusi, media secara konsisten membangun sebuah panggung dengan dua kutub antagonistik: “korban” yang tertindas versus “pelaku” yang lalim. Figur rakyat kecil dan pemilik warung secara sistematis diposisikan sebagai representasi “korban” yang murni, sebagaimana terangkum dalam slogan populis Adian Napitupulu, “Jangan Kambing Hitamkan Warung” . Di sisi lain, pemerintah dan institusinya difabrikasi sebagai “pelaku” yang abai dan tidak kompeten. Konstruksi biner ini diperkuat lebih jauh melalui personifikasi konflik, di mana debat kebijakan diubah menjadi pertarungan “David vs. Goliath” dengan menampilkan warga biasa yang secara heroik mengkonfrontasi pejabat tinggi negara. Secara ilmiah, strategi ini sangat efektif karena ia menyederhanakan atribusi kausalitas publik tidak perlu lagi bersusah payah

memahami kerumitan masalah, karena media telah menyediakan jawaban yang jelas tentang siapa yang harus disalahkan.

Dramaturgi politik ini kemudian diamplifikasi melalui pilihan stilistika dan sensasionalisme yang dirancang untuk menciptakan resonansi afektif atau ikatan emosional dengan audiens. Penggunaan judul-judul provokatif seperti “Gara-Gara Gas Lee” dan pemakaian tagar seperti #KONTROVERSI bukanlah pilihan editorial yang netral . Pilihan leksikal ini berfungsi sebagai penanda yang sejak awal menginstruksikan audiens untuk melihat isu ini sebagai sebuah skandal atau konflik panas, bukan sebagai diskursus kebijakan publik yang normal. Hal ini secara efektif menciptakan atmosfer permusuhan (*hostile atmosphere*) yang mendorong interpretasi negatif terhadap setiap tindakan atau pernyataan dari pihak pemerintah, bahkan sebelum konten video ditonton sepenuhnya.

Secara keseluruhan, rangkaian teknik framing ini mulai dari konstruksi biner, personifikasi konflik, hingga amplifikasi sensasionalisme bekerja secara sinergis sebagai sebuah ‘mesin’ yang terkoordinasi. Fungsinya jelas: mentransformasi ketidakpercayaan publik yang laten dan tersebar menjadi sebuah penolakan politis yang terartikulasi dan terarah. Dengan menyediakan narasi yang sederhana, kuat secara emosional, dan jelas secara moral, media mempercepat proses delegitimasi, membawa sentimen publik dari tahap ketidakpuasan pasif menuju sebuah oposisi politis yang aktif dan vokal.

3.6.3. Revisi Kebijakan dan Legitimasi Pemerintah

Puncak pembuktian dari dampak politis persepsi publik adalah ketika negara, sebagai pemegang otoritas, merespons tekanan tersebut dengan melakukan perubahan kebijakan secara fundamental. Keputusan pemerintah untuk merevisi skema distribusi LPG 3 kg secara drastis hanya beberapa hari setelah implementasi penuh bukanlah sebuah kebetulan atau hasil dari siklus evaluasi kebijakan yang normal. Sebaliknya, ini adalah sebuah kapitulasi politis terhadap krisis legitimasi yang meluas. Bukti paling sah dari respons ini termaktub dalam Siaran Pers resmi Kementerian ESDM Nomor: 009.Pers/04/SJI/2025, yang mengumumkan bahwa seluruh 375.000 pengecer diangkat menjadi sub-pangkalan resmi. Keputusan ini secara efektif membatalkan inti dari kebijakan distribusi sebelumnya dan merupakan pengakuan implisit bahwa model awal telah gagal total, bukan karena alasan teknis, tetapi karena tidak dapat dipertahankan di hadapan gelombang penolakan publik.

Eskalasi isu ini dari sekadar masalah sektoral menjadi krisis politik nasional terkonfirmasi dengan adanya intervensi dari otoritas tertinggi. Siaran pers tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan revisi ini merupakan implementasi dari instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Keterlibatan langsung seorang Presiden dalam isu distribusi teknis seperti ini adalah sebuah anomali yang menandakan bahwa dampak dari persepsi publik telah dianggap cukup serius untuk mengancam stabilitas politik dan citra pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi yang terkikis di tingkat bawah telah berhasil menarik perhatian hingga ke pusat kekuasaan, memaksa

adanya tindakan resolusi dari atas untuk meredam gejolak sosial yang lebih luas. Akhirnya, proses delegitimasi ini ditutup dengan sebuah tindakan simbolis yang krusial: permintaan maaf dari pejabat yang bertanggung jawab.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kendala yang muncul di lapangan, termasuk antrean dan distribusi yang tidak merata. Dalam dramaturgi politik, sebuah permintaan maaf dari figur otoritas bukanlah sekadar pernyataan administratif; ia adalah sebuah pengakuan kekalahan dalam perang narasi. Ini adalah momen di mana negara secara simbolis mengakui validitas keluhan publik dan keunggulan narasi "penderitaan rakyat" di atas narasi "efisiensi" yang mereka usung. Secara kolektif, revisi kebijakan yang cepat, intervensi presiden, dan permintaan maaf menteri menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa persepsi publik digital yang terartikulasi dan diamplifikasi oleh media kini memiliki kapital politik riil untuk menuntut akuntabilitas dan memaksakan perubahan pada level tertinggi pemerintahan.

3.6.4. Dampak Reputasional: Menyerang Aktor, Bukan Hanya Kebijakan

Analisis dampak kebijakan di era digital kontemporer tidak lagi dapat berhenti pada level institusional semata; ia secara inheren merembet ke level personal para aktor yang terlibat. Dalam krisis kebijakan yang kompleks, psikologi publik cenderung mencari penyederhanaan kausalitas, yang seringkali berujung pada mekanisme kambing hitam (*scapegoating mechanism*). Dalam kasus ini, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara sistematis diposisikan sebagai subjek dari mekanisme tersebut. Sebagai figur pemerintah yang paling vokal dan terlihat dalam

menyosialisasikan kebijakan ini, setiap penampilan publiknya secara efektif mengikat kredibilitas personalnya pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Momen konfrontasi langsung dengan warga menjadi titik kristalisasi dari proses ini, di mana ia tidak lagi dilihat sebagai representasi negara, melainkan sebagai personifikasi kegagalan itu sendiri. Seluruh aspek negatif kebijakan mulai dari kesulitan teknis hingga dampak kemanusiaan diasosiasikan secara langsung kepadanya, mentransformasikan akuntabilitas institusional menjadi kesalahan individual dan membuat reputasi politiknya sangat rentan.

Di sisi spektrum yang berlawanan, kemarahan publik yang masif menciptakan sebuah struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politis yang jeli. Dalam konteks ini, Adian Napitupulu dapat dianalisis sebagai seorang wirausahawan politik (*political entrepreneur*) yang secara strategis mengidentifikasi dan mengkapitalisasi sentimen negatif yang ada. Narasi pembelaannya yang berbingkai "Jangan Kambing Hitamkan Warung" berfungsi sebagai intervensi yang dirancang untuk beresonansi secara maksimal dengan narasi viktimisasi yang sudah dirasakan publik. Keberhasilan manuver ini terbukti secara kuantitatif melalui anomali sentimen positif sebesar 28,3% pada video yang berfokus padanya. Angka ini bukanlah dukungan terhadap kebijakan, melainkan sebuah afirmasi politis; ia merepresentasikan keberhasilan Adian dalam "memanen" ketidakpuasan publik dan mengonversinya menjadi dukungan serta legitimasi bagi persona politiknya sendiri.

Kedua proses ini penjatuhan reputasi satu aktor dan pengangkatan reputasi aktor lainnya berjalan secara simultan dalam sebuah arena reputasi *zero-sum* (*zero-sum reputational game*) yang difasilitasi oleh media digital. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep polarisasi afektif, di mana simpati yang intens terhadap satu figur (Adian) berbanding lurus dengan antipati yang sama intensnya terhadap figur lawan (Bahliil). Setiap modal reputasi yang hilang dari Menteri ESDM tidak lenyap begitu saja, melainkan ditransfer menjadi keuntungan bagi figur oposisi. Dinamika ini membuktikan bahwa dampak politis dari persepsi publik di era digital bersifat tajam dan personal. Ia tidak hanya mampu mendelegitimasi sebuah kebijakan, tetapi juga mampu secara cepat dan efektif merombak peta reputasi para elite politik, menunjukkan betapa krusialnya manajemen narasi dan citra dalam praktik pemerintahan modern.